



TREN DEFISIT NERACA PERDAGANGAN INDONESIA–TIONGKOK: ALARM UNTUK HILIRISASI DAN DIVERSIFIKASI EKSPOR

Rasbin*

Abstrak

Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia dengan pangsa ekspor lebih dari 20%, namun neraca perdagangan bilateral masih defisit. Tulisan ini menganalisis tren defisit neraca perdagangan Indonesia-Tiongkok sebagai alarm penting untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam dan diversifikasi ekspor. Pada Januari–Juli 2025, defisit mencapai US\$12,07 miliar, naik 84,8% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Ketimpangan struktural terlihat jelas: ekspor Indonesia didominasi komoditas primer bernilai tambah rendah seperti mineral, nikel, sawit, dan baja, sedangkan impor dari Tiongkok berupa produk manufaktur bernilai tinggi. Kondisi ini menjadi alarm strategis bagi percepatan hilirisasi, diversifikasi pasar ekspor, dan optimalisasi pemanfaatan perjanjian dagang. Komisi VI DPR RI dalam fungsi pengawasan perlu mendorong Kementerian Perdagangan untuk aktif dan efektif mengawasi agar program fasilitasi ekspor (seperti FTA Center dan digitalisasi SKA) benar-benar menjangkau UMKM. Selain itu, Komisi VI juga memiliki peran strategis untuk mendorong BUMN menjadi motor penggerak dalam program hilirisasi dan substitusi impor guna memperkuat daya saing nasional.

Pendahuluan

Hubungan dagang Indonesia dengan Tiongkok merupakan salah satu yang paling strategis bagi perekonomian nasional. Dalam dekade terakhir, Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia, baik dalam ekspor maupun impor. Sepanjang Januari–Agustus 2025, ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok mencapai US\$40,44 miliar atau 22,97% dari total ekspor nonmigas nasional. Angka ini menempatkan Tiongkok sebagai tujuan ekspor utama, melampaui Amerika Serikat (11,7%) dan India (7,2%). Sebaliknya, impor nonmigas dari Tiongkok pada periode yang sama mencapai US\$54,76 miliar, atau 40,6% dari total impor nonmigas Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2025). Hal ini menjadikan Tiongkok sebagai negara asal utama impor Indonesia.

Meskipun neraca perdagangan Indonesia (NPI) secara umum mencatat surplus dalam dekade terakhir, kecuali pada tahun 2018, NPI dengan Tiongkok justru menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Sejak 2008, Indonesia konsisten mengalami defisit, hanya sempat berbalik surplus pada tahun 2023. Bahkan pada Januari–Juli 2025, data dari TradeMap mencatat defisit NPI dengan Tiongkok mencapai US\$12,07 miliar. Kondisi ini bersifat kronis dan mengindikasikan ketergantungan struktural, ketika pertumbuhan ekspor Indonesia ke Tiongkok tidak mampu menutup laju impornya yang jauh lebih besar.

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: rasbin@dpr.go.id

Kesenjangan struktural ini merefleksikan pola perdagangan yang timpang antara Indonesia dan Tiongkok. Defisit NPI dengan Tiongkok tidak bisa dianggap hanya masalah angka, namun menjadi sejenis alarm struktural. Tulisan ini menyajikan analisis tren defisit tersebut sebagai alarm penting untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam dan diversifikasi ekspor.

Struktur dan Kinerja Perdagangan Indonesia-Tiongkok

Tiongkok saat ini menempati posisi sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, menyumbang lebih dari seperempat total nilai perdagangan luar negeri Indonesia. Namun, di balik capaian tersebut tersimpan persoalan struktural, yakni tren defisit NPI dengan Tiongkok yang terus berlanjut. Berdasarkan data TradeMap, periode tahun 2015–2025 menggambarkan pola fluktuatif, tetapi tetap didominasi defisit. Pada tahun 2015–2019, defisit mencapai US\$12,7–18,4 miliar, sebelum mengecil pada tahun 2020–2022 menjadi US\$1,8–7,9 miliar, bahkan sempat surplus US\$2,06 miliar pada tahun 2023. Namun, defisit kembali melebar pada tahun 2024 hingga US\$10,29 miliar dan mencapai US\$12,06 miliar per Juli 2025, meningkat 84,8% dibanding tahun sebelumnya. Ini menjadikan Tiongkok sebagai mitra dagang dengan defisit terbesar bagi Indonesia.

Struktur perdagangan bilateral Indonesia-Tiongkok juga memperlihatkan pola yang sangat timpang. Data dari TradeMap menunjukkan bahwa ekspor Indonesia ke Tiongkok masih didominasi oleh komoditas primer dan bahan mentah, dengan kontribusi produk manufaktur bernilai tambah sangat terbatas. Komoditas utama tersebut meliputi bahan bakar mineral (HS 27), besi dan baja (HS 72), lemak dan minyak hewan/nabati termasuk CPO (HS 15), nikel dan logam dasar lainnya (HS 75), serta bubur kayu/pulp (HS 47). Terhadap total ekspor masing-masing komoditas, rata-rata pangsa ekspor kelima komoditas tersebut ke Tiongkok pada periode tahun 2020-2024 mencapai 30,2% untuk HS 27; 66% untuk HS 72; 19,2% untuk HS 15; 50% untuk HS 75; dan 79,1% untuk HS 47. Kondisi ini menunjukkan besarnya ketergantungan ekspor Indonesia terhadap pasar Tiongkok untuk komoditas-komoditas tersebut. Bahkan, untuk HS 72, HS 75, dan HS 47, lebih dari separuh ekspornya bergantung pada permintaan dari Tiongkok.

Sebaliknya, masih berdasarkan data TradeMap, impor Indonesia dari Tiongkok didominasi oleh produk manufaktur bernilai tambah tinggi, seperti mesin dan peralatan mekanik (HS 84), mesin dan peralatan listrik (HS 85), HS 72, plastik dan barang dari plastik (HS 39), dan produk kimia organik (HS 29). Terhadap total impor masing-masing komoditas, rata-rata pangsa impor kelima komoditas tersebut dari Tiongkok pada periode 2020-2024 tercatat sebesar 52,6% untuk HS 85; 47,5% untuk HS 84; 31,9% untuk HS 29; 26,9% untuk HS 39; dan 25,4% untuk HS 72.

Data tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki ketergantungan besar terhadap Tiongkok sebagai pemasok utama berbagai komoditas impor strategis, khususnya HS 84 dan HS 85. Dengan hampir separuh hingga lebih dari 50% kebutuhan impor kedua komoditas tersebut berasal dari Tiongkok, sektor manufaktur Indonesia menjadi rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan dan fluktuasi ekonomi di negara tersebut. Ketergantungan serupa juga terlihat pada impor HS 72, HS 39, serta HS 29 yang berperan sebagai bahan baku

penting bagi industri pengolahan. Kondisi ini menegaskan peran Tiongkok sebagai mitra dominan yang memengaruhi struktur biaya dan daya saing industri nasional.

Sinyal Ekonomi dan Implikasi Terhadap Pembangunan Nasional

Defisit NPI dengan Tiongkok yang terus berulang memberikan sejumlah sinyal penting bagi perekonomian nasional. *Pertama*, menunjukkan terjadinya perangkap komoditas (*commodity trap*) yang mencerminkan ketergantungan dalam struktur perdagangan Indonesia. Pola ekspor Indonesia masih didominasi komoditas mentah seperti mineral, batu bara, minyak sawit, dan logam dasar, sementara kebutuhan domestik sebagian besar dipenuhi oleh impor produk manufaktur bernilai tambah tinggi dari Tiongkok. Kondisi ini menegaskan bahwa struktur perdagangan Indonesia bersifat asimetris, di mana Indonesia berperan sebagai pemasok bahan mentah sekaligus konsumen produk olahan bernilai tinggi (Ghodsi & Stehrer, 2018). Dalam konteks ini, arus impor manufaktur bernilai tinggi dari Tiongkok menjadi salah satu faktor utama yang memperdalam defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok.

Kedua, defisit yang meningkat tajam pada 2025, yakni naik 84,8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan adanya kesenjangan pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas (*FTA utilization gap*). Mekanisme kerja sama seperti ASEAN–China FTA (ACFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mendorong ekspor Indonesia (Achmad & Elisabeth, 2024), sehingga manfaatnya lebih banyak dirasakan di sisi impor.

Defisit NPI dengan Tiongkok memiliki implikasi serius bagi pembangunan nasional. Dari sisi ekonomi makro, defisit yang besar berpotensi menggerus surplus perdagangan total, menekan neraca transaksi berjalan, dan mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah. Dari sisi industri, banjir produk manufaktur murah asal Tiongkok membuat industri domestik kesulitan bersaing dan memperlambat substitusi impor. Kondisi ini menandakan program hilirisasi sumber daya alam belum optimal, sehingga Indonesia masih berperan sebagai eksportir bahan mentah. Dalam jangka panjang, ketergantungan tinggi terhadap pasar Tiongkok dapat menurunkan kedaulatan ekonomi dan melemahkan posisi tawar Indonesia dalam diplomasi perdagangan (Sari, 2025).

Sebagai perbandingan, pengalaman negara seperti Vietnam dan Malaysia memperlihatkan bahwa ketimpangan perdagangan dengan Tiongkok bukanlah hal yang tak terelakkan. Vietnam berhasil memanfaatkan keanggotaannya dalam RCEP dan berbagai perjanjian perdagangan lain untuk meningkatkan ekspor produk manufaktur, seperti elektronik, tekstil, dan barang olahan (Estrades et al., 2022). Melalui strategi tersebut, meski tetap bergantung pada Tiongkok, struktur perdagangannya menjadi lebih seimbang dan defisitnya lebih kecil dibandingkan Indonesia. Di sisi lain, Malaysia sukses memperkuat hilirisasi sektor kelapa sawit dan karet, menjadikan eksportnya lebih berorientasi pada produk bernilai tambah (Malaysian Palm Oil Council, 2024). Pengalaman kedua negara ini menegaskan bahwa keberhasilan menekan ketimpangan perdagangan tidak semata ditentukan oleh keberadaan perjanjian dagang, tetapi juga oleh kesiapan industri nasional, konsistensi dalam mendorong hilirisasi, serta strategi diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu mitra dagang utama.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan sinyal ekonomi, dampak yang ditimbulkan, serta pengalaman internasional yang relevan, terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat ditempuh Indonesia. *Pertama*, percepatan hilirisasi pada sektor industri strategis perlu menjadi prioritas. Pemerintah harus mempercepat pengembangan industri bernilai tambah dengan memperluas ekspor ke produk manufaktur, seperti industri baterai berbasis nikel, oleokimia dari *crude palm oil* (CPO), dan baja hilir. *Kedua*, diversifikasi pasar ekspor juga mendesak dilakukan melalui optimalisasi berbagai perjanjian perdagangan di luar Tiongkok, antara lain Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), Indonesia-United Arab Emirates (IUAU) CEPA, dan Indonesia-European Free Trade Agreement (IE) CEPA, agar ketergantungan ekspor tidak terpusat pada satu negara.

Ketiga, pemanfaatan perjanjian dagang perlu dioptimalkan disertai dengan penguatan industri substitusi impor. Langkah ini dapat ditempuh dengan penyederhanaan aturan asal barang, digitalisasi dokumen, serta peningkatan kapasitas UMKM agar mampu memanfaatkan tarif preferensi. Selain itu, penguatan industri mesin, elektronika, dan kimia dasar domestik penting untuk mengurangi impor barang modal. *Keempat*, diperlukan diplomasi dagang yang lebih proaktif dengan Tiongkok untuk memperluas akses pasar produk olahan Indonesia dan mendorong investasi yang berorientasi ekspor. Melalui langkah-langkah tersebut, defisit perdagangan dapat ditekan sambil memperkuat struktur industri nasional yang berdaya saing global.

Penutup

Terjadinya tren defisit neraca perdagangan Indonesia–Tiongkok merupakan alarm penting bagi perekonomian nasional. Struktur perdagangan yang timpang, dominasi komoditas primer, dan tingginya impor produk manufaktur dari Tiongkok menunjukkan perlunya strategi komprehensif. Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan ekspor berbasis sumber daya alam. Hilirisasi industri, diversifikasi pasar ekspor, optimalisasi pemanfaatan FTA, dan penguatan industri substitusi impor adalah langkah strategis yang harus segera dilakukan.

Komisi VI DPR RI dalam fungsi pengawasan perlu mendorong Kementerian Perdagangan untuk aktif dan efektif mengawasi agar program fasilitasi ekspor (seperti FTA *Center* dan digitalisasi surat keterangan asal/SKA) benar-benar menjangkau UMKM, sehingga pemanfaatan perjanjian dagang tidak hanya dinikmati eksportir besar. Selain itu, Komisi VI juga memiliki peran strategis untuk mendorong BUMN menjadi motor penggerak dalam program hilirisasi dan substitusi impor.

Referensi

- Achmad, R.A., & Elisabeth, C.R. (2024). The impact of utilization free trade agreements (FTA) and fiscal facilities KITE-IKM on the export performance of small and medium enterprises (SMEs). *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 3(9), 1905-1918.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Perkembangan ekspor dan impor Indonesia Agustus 2025*. Berita Resmi Statistik, No. 87/10/Th. XXVIII.
- Estrades, C., Maliszewska, M., Nguyen, H.N., Nguyen, X.T.T., Osorio-Rodarte, I., Pham, D.M., Seara E Pereira, M.F., & Thang, T.T. (2022). Vietnam's accession to the regional comprehensive economic partnership: A legal and economic assessment. Washington, D.C.: World Bank Group.
- Ghodsi, M., & Stehrer, R. (2018). Avoiding and escaping the commodity trap in development. WIIW Working Paper 153.
- Malaysian Palm Oil Council. (2024, April). Navigating Malaysian palm oil downstream industries: Analysis of 2023 and prospects for 2024. *PalmPulse*, 12, 2-5.
- Sari, T.D.P. (2025). Ketergantungan ekspor Indonesia terhadap China dan Tantangan Global dari Kebijakan Dagang AS. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 2(1), 984-992.

